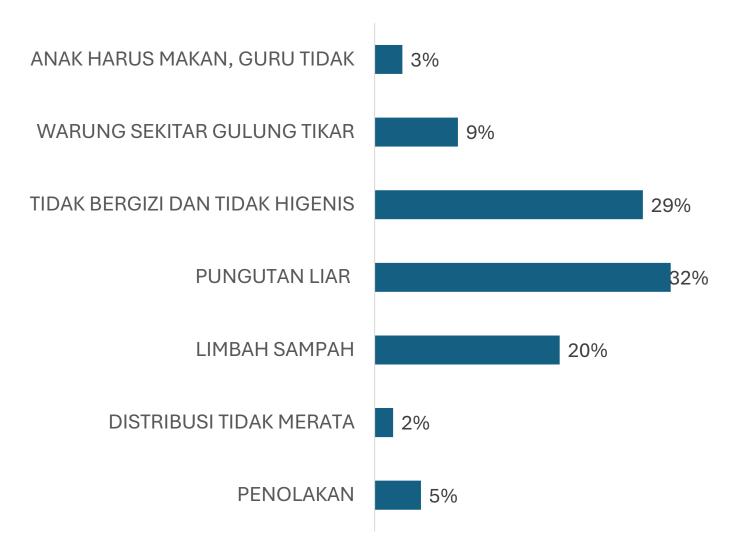


GARA-GARA MBG

SEKTOR PENDIDIKAN KIAN MENDERITA

UBAID MATRAJI -Kornas JPPI

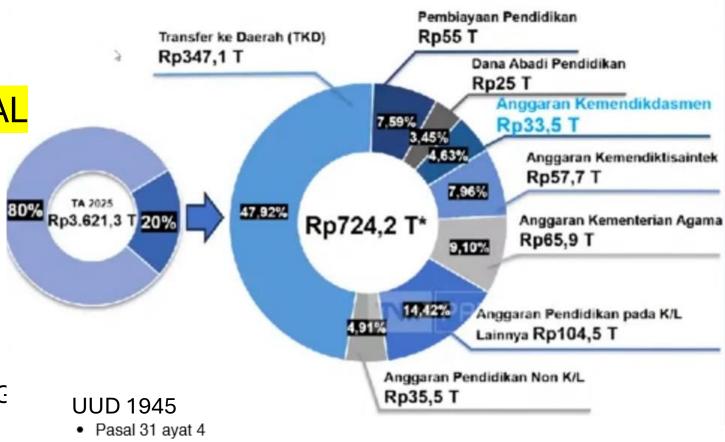
KOMPLAIN ANAK/ORTU TERKAIT MBG



REALITAS MBG DI SEKOLAH

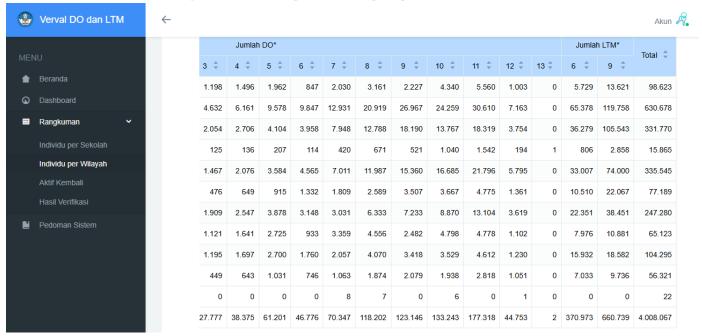
MBG SUNAT MANDATORY
SPENDING 20% UNTUK
PENDIDIKAN, PEMERINTAH
DIDUGA INKONSTITUSIONAL

- MBG MENGURANGI ANGGARAN PENDIDIKAN
 - PEMOTONGAN/EFISIENSI
 - REALOKASI UNTUK MBG
- ANGGARAN PENDIDIKAN KURANG DARI 20%
- MENYALAHI MANDATORY SPENDING MINIMAL 20% UNTUK PENDIDIKAN



(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenihi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional.

- Pasal 31 ayat 1 dan 2
 UUD 1945
- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.



HAK ATAS AKSES PENDIDIKAN HARUS DIDAHULUKAN DARIPADA MBG

4 JUTA ANAK MASIH TIDAK SEKOLAH

TEMUAN JPPI:

DAMPAK
PEMOTONGAN
ANGGARAN
PENDIDIKAN
UNTUK MBG

- DANA BOS UNTUK MADRASAH DIKURANGI, BANYAK MADRASAH TERANCAM GULUNG TIKAR.
- JATAH PPG/SERTIFIKASI GURU DIPANGKAS, MEMPERBURUK MUTU GURU DAN MEMPERPANJANG ANTRIAN PPG
- JUMLAH PENERIMA PIP DAN KIP-KULIAH SEMAKIN MINIM, BERPOTENSI PUTUS SEKOLAH/KULIAH BERTAMBAH
- PENGURANGAN PORSI DANA BEASISWA, MEMPERSEMPIT AKSES
- TUNJANGAN GURU DAN DOSEN, ANCAMAN PEMECATAN GURU HONORER
- BOP PTN DIKURANGI, UKT POTENSIAL NAIK
- BANTUAN KELEMBAGAAN PTS, KOMERSIALISASI PENDIDIKAN TINGGI

MBG BUKAN
PROGRAM
PENDIDIKAN,
TAPI AGENDA
POLITIK

POLITISASI SEKTORPENDIDIKAN

MELUNASI JANJI KAMPANYE, DAN POLITIK PENCITRAAN

MENGHAMBAT AKSES DAN MERUSAK KUALITAS PENDIDIKAN